

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam bab VI yaitu kesimpulan dan saran menjawab pertanyaan penelitian yang ada di bab I yaitu fasilitas perhubungan darat telah tersedia semua oleh dinas perhubungan Kota Bandung yaitu fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas terminal, fasilitas parkir, fasilitas pemberhentian, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit, dan fasilitas pesepeda.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya bahwa peneliti hanya menemukan keefektifan hanya pada dua dimensi saja yaitu pada tepat kebijakan dan tepat pelaksanaan untuk ketujuh fasilitas tersebut. Sedangkan untuk dimensi yang lainnya seperti tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses tidak efektif untuk beberapa fasilitas.

Keefektifan implementasi pertama dilihat pada tepat kebijakan. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas perhubungan darat yang ada di Kota Bandung sesuai dengan aturan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Namun dengan adanya fasilitas perhubungan darat belum dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Bandung.

Pada dimensi kedua yaitu tepat pelaksanaan bahwa didalam implementasinya sudah efektif. Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu pihak dinas perhubungan

Kota Bandung mengimplementasikan fasilitas perhubungan darat sesuai dengan tugas nya masing-masing. Selain itu, dinas perhubungan Kota Bandung melakukan koordinasi dengan masyarakat Kota Bandung yang terdampak pada pengimplementasian fasilitas perhubungan darat. Koordinasi tersebut merupakan perizinan atas pemasangan fasilitas perhubungan darat di daerah mereka. Apabila masyarakat Kota Bandung mengizinkan maka baru pemasangan fasilitas perhubungan darat dilakukan dan sebaliknya apabila masyarakat Kota Bandung tidak memberikan perizinan maka dinas perhubungan Kota Bandung tidak dapat memasang fasilitas perhubungan darat di tempat tersebut. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut pasti sering terjadi hambatan. Hambatan nya ialah bahwa dinas perhubungan Kota Bandung masih kurangnya personil untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Tepat target adalah menjadi dimensi ketiga dalam mengukur efektivitas. Dalam pengimplementasian kebijakan ini dilihat dari tepat target tidak efektif di fasilitas pemberhentian dan fasilita pesepeda karena dinas perhubungan Kota Bandung menyediakan fasilitas perhubungan darat itu memiliki target sasaran tetapi pada realitanya bahwa fasilitas perhubungan darat digunakan juga oleh orang-orang yang dianggap sebagai bukan target sasaran. Orang-orang tersebut menggunakan fasilitas tersebut tidak sesuai dengan fungsi nya dan melakukan pelanggaran.

Keempat adalah tepat lingkungan. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan interaksi dengan Lembaga pemerintahan di Kota Bandung seperti pemerintah Kota Bandung (pemkot) sebagai perumus kebijakan dan Dinas Pekerjaan umum Kota Bandung selaku ikut dalam pengimplementasian

penyelenggaraan fasilitas perhubungan darat dan stakeholder lainnya. Namun dari lingkungan eksternal yaitu opini publik bahwa fasilitas pemberhentian ini kurang aman dan nyaman yang mengakibatkan masyarakat kurang puas dengan penyelenggaraan fasilitas perhubungan darat di Kota Bandung.

Dimensi kelima adalah tepat proses. Dalam pengimplementasian kebijakan ini yaitu khususnya dalam fasilitas perhubungan darat bahwa dari segi target sasaran sendiri masih sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi sangat beragam dari setiap fasilitas yang telah disediakan oleh dinas perhubungan Kota Bandung. Pada tepat proses ini hampir seluruh fasilitas belum memenuhi tepat proses yang mengakibatkan tidak efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar efektif didalam implementasi penyelenggaraan fasilitas perhubungan darat di Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah menjadi hal terpenting dalam keefektifan implementasi, maka dari itu. Dinas perhubungan Kota Bandung sebagai penyelenggara implementasi penyelenggaraan fasilitas perhubungan darat di Kota Bandung harus sering melakukan pengawasan kepada fasilitas-fasilitas perhubungan darat agar target sasaran mematuhi dan melaksanakan penggunaan fasilitas perhubungan darat dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Dengan mematuhi dan melaksanakan penyelenggaraan fasilitas perhubungan darat ini implementasi akan lebih efektif.

2. Penindakan secara tegas dan pemberian sanksi kepada bukan target sasaran namun menggunakan fasilitas perhubungan darat dengan cara menggunakan fasilitas tersebut dengan tidak sesuai fungsinya. Ini menjadi salah satu cara agar implementasi efektif. Dengan begitu fasilitas perhubungan darat di Kota Bandung dapat digunakan tepat sesuai target sasaran.
3. Melakukan pemeliharaan pada fasilitas perhubungan darat di Kota Bandung dapat menjadi cara implementasi efektif. Dengan pemeliharaan baik maka banyak target sasaran puas, maka itu akan meningkatkan efektivitas implementasi dalam tepat lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia Edu, “*Penelitian Stusi Kasus*”, Imania Bidari. 2014
https://www.academia.edu/7111171/Penelitian_Studi_Kasus?auto=download Diakses pada Tanggal 1 April 2020 Pukul 19.00
- Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), Hal. 12
- Antara News, “*Kendaraan Pribadi Jadikan Kota Bandung Kota Termacet*”,
<https://www.antaraneews.com/berita/1100808/kendaraan-pribadi-jadikan-bandung-kota-termacet> Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 11.13
- A. Triani, “Kemacetan Bandung dan “Big Data””,
<https://news.detik.com/kolom/d-4772429/kemacetan-bandung-dan-big-data> Diakses 17 Oktober 2020.
- B. Bachri, “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010 (46-62), Hal. 56-57.
- B. Salaka, “*Apa Yang Dimaksud dengan Triangulasi didalam Metode Penelitian Kualitatif ?*”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-triangulasi-didalam-metode-penelitian-kualitatif/118512> Diakses pada Tanggal 2 April 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, “*Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan, Jeep dan Station Wagon (Unit), 2015-2018*”,
<https://bandungkota.bps.go.id/indicator/17/150/1/jumlah-kendaraan-bermotor-jenis-sedan-jeep-dan-station-wagon.html> Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2020, Pada Pukul 2.25
- Badan Pusat Statististik Kota Bandung, “*Kota Bandung dalam Angka 2020*” Hal.4
- E.Mardiana, “*Kemacetan Kota Bandung Kalahkan Jakarta dan Surabaya!*”,
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4733737/kemacetan-kota-bandung-kalahkan-jakarta-dan-surabaya> Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2020.
- G. Edward, “*Implementing Public Policy*“, Washington DC : Congressional Querterly Inc.
- G. Mangkoesobroto, “*Ekonomi Publik*”, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1993)

Hal. 2

H. Akib , “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn 2010, Hal. 2

Hasil Wawancara Kepala UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Pada Tanggal 27 Oktober 2020

H. Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*”, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, Hal.36

J.W Creswell, “*Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”, Sage Publications, 2014, Hal 32

Keputusan walikota, Peraturan WaliKota Bandung Nomor 634 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan., Pasal 50 Ayat 1-5

Kompas.com, “*Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all> Diakses pada Tanggal 17 Februari 2020.

Liputan 6, “*Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*”, <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

L. J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif, In L. J. Moleong, Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data*”, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2018) Hal. 328

L.News, “*Selain Jakarta, Ini 5 Kota Termacet di Indonesia*”, <https://kumparan.com/light-news/selain-jakarta-ini-5-kota-termacet-di-indonesia-1szX7VUIt7F/full> Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2020.

M.D.R Marpaung, “*Efektivitas Implementasi Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Untuk Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten Bekasi*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012, https://www.academia.edu/7512256/Efektivitas_Implementasi_Kebijakan_FLPP_Untuk_Kepemilikan_Rumah_Tapak Diakses Pada Tanggal 28 November 2020.

- M. Hutahean , “*Langkah Praktis Melakukan Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik*”, Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik, Silalahi Ulber, dkk. Unpar Press, Hal. 212
- Nisa Maulida N dan Herbasuki Nurcahyanto. “ *Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus: Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes)*”,
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1522432&val=4925&title=ANALISIS%20EFEKTIVITAS%20PROGRAM%20TENAGA%20KERJA%20MANDIRI%20TKM%20DI%20KABUPATEN%20PURWAKARTA%20STUDI%20KASUS%20%20DESA%20TARINGGULLANDEUH%20KECAMATAN%20KIARAPEDES> Diakses Pada Tanggal 29 November 2020.
- O. Abegunde, *Public Policy And Development In Developing Nations: Selected Case*, (Nigeria: Xlibris, 2015), Hal 8
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- T. A. Birkland, “An Introduction To The Policy Process Theories, Concepts, and Model of Public Policy Making”, (Newyork and London: Routledge,2016), Hal. 334.
- T. Rachmawati , “*Kepatuhan Kelompok Sasaran Sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 1, No.2, pp -27-36, 2015, Hal 30
- U. Haq Fathia, *Fokus Bandung: Pengamat Transportasi Ungkap Sebagian Halte TMB di Bandung Tidak Sesuai Peruntukan*,
<https://www.ayobandung.com/read/2018/10/09/39025/fokus-bandung-pengamat-transportasi-ungkap-sebagian-halte-tmb-di-bandung-tidak-sesuai-peruntukan> Diakses pada Tanggal 01 Februari 2021.
- W Dunn, “*Public Policy Analysis An Integrated Approach*”, (New York and London: Routledge, 2018), Hal. 3-8
- Y. Kadji, “*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*”, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), Hal 9.

Y. Pasha , *Sambut Hari Jadi Perhubungan, Tapi Begini Kondisi Halte TMB Di Bandung*, IDN TIMES JABAR,
<https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/sambut-hari-jadi-perhubungan-tapi-begini-kondisi-halte-tmb-di-bandung/full> Diakses pada tanggal 01 Februari 2021.